EFEKTIVITAS BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK DALAM MENANGANI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

EFFECTIVENESS OF SOCIAL REHABILITATION AND CARING OF CHILDREN IN HANDLING CHILDREN'S SOCIAL WELFARE PROBLEMS IN THE SPECIAL REGIONS YOGYAKARTA

Oleh :Bimo Anantyo dan Dra. Sugi Rahayu, M.Pd., M.Si, Fakultas Ilmu Sosial UNY, bimoanantyo0@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial anak di Daerah Istimewa Yogyakarta, mengidentifikasi pendukung dan hambatan dalam proses tersebut serta memberikan masukan atau rekomendasi kepada pihak-pihak terkait dalam rangka penanganan dan pengasuhan penyandang masalah kesejahteraan sosial anak. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial anak di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah efektif diukur menggunakan 3 (tiga) indikator menurut Duncan yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Faktor penghambat yang dialami oleh Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak adalah kurangnya jumlah pekerja sosial dan sulitnya merujuk klien ke lembaga lain. Faktor pendorong efektivitas Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial anak di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah luasnya jejaring kerjasama dengan pihak-pihak seperti Dinas Sosial, Rumah Sakit, Puskesmas, Sekolah, Kepolisian, dan Dukcapil ditambah dengan lokasi Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak yang jauh dari pusat kota dan keramaian.

Kata kunci : Efektivitas Organisasi, Balai Rehabilitasi, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak.

ABSTRACT

*This study aimed to determine the effectiveness of the Association of Social Rehabilitation and Child Care in dealing with children's social welfare problems in Yogyakarta Special Region.**T**his study aimed to identify endorsement and obstacles in the process and provide input or recommendations to relevant parties in the context of handling and caring for people with social welfare child. The research design used descriptive with a qualitative approach. The results showed that the Association of Social Rehabilitation Center and Child Care in dealing with people with social welfare problems in the Special Region of Yogyakarta had been effectively. This study measured 3 (three) indicators according to Duncan, namely achievement of goals, integration, and adaptation. The inhibiting factor experienced by the Association of Social Rehabilitation and Child Care Center was the lack of a number of social workers and the difficulty of referring clients to other institutions. The driving factors for the effectiveness of the Association of Social Rehabilitation Center and Child Care in dealing with persons with child social welfare problems in the Special Region of Yogyakarta werw the extensive network of cooperation with agencies such as the social service agency, hospitals, health centers, schools, police department, population and civil registration agency, and childcare is far from the city center and crowds.*

Keywords: Effectiveness Organizzation, Rehabilitation Centre, Child With Social Welfare.

PENDAHULUAN

Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan salah satu kota besar di Indonesia juga mengalami peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS) dari tahun ke tahun, tidak hanya didominasi oleh orang dewasa, namun tidak sedikit juga berasal dari golongan balita dan anak-anak. Menurut Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini ada berbagai golongan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak (PMKSA) yaitu anak berhadapan dengan hukum, anak balita terlantar, anak dengan kedisabilitasan, anak jalanan, anak korban tindak kekerasan, anak memerlukan perlindungan khusus, dan anak terlantar. Berikut merupakan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak (PMKSA) pada tahun 2017.

Tabel 1. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak (PMKSA) DIY Tahun 2017

No.	Jenis Penyandang	Jumlah (anak)
1	Anak berhadapan dengan hukum	219
2	Anak balita terlantar	1.309
3	Anak dengan kedisabilitasan	2.983
4	Anak Jalanan	348
5	Anak korban tindak kekerasan	11
6	Anak memerlukan perlindungan khusus	101
7	Anak terlantar	13.960

Sumber : Dinas Sosial Provinsi DIY, 2017

Tingginya jumlah anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial ini tentu menjadi riskan mengingat masa depan bangsa dapat dilihat dari masa depan anak-anak bangsa, para anak-anak yang kurang beruntung ini seharusnya diberi perhatian lebih oleh Dinas Sosial mengingat mereka juga mempunyai cita-cita yang tinggi sama dengan anak-anak pada umumnya.

Seperti yang tercantum dalam Pedoman Pelayanan Sosial Anak (Departemen Sosial RI, 2008:1), permasalahan anak dapat kita lihat dari berbagai perspektif, diantaranya; 1) anak yang mengalami masalah dalam sistem pengasuhan seperti yang dialami anak yatim piatu, anak yatim, anak piatu, anak dari orang tua tunggal, anak dengan ayah atau ibu tiri, anak dari keluarga yang kawin muda, dan anak yang tidak diketahui asal-usulnya (anak yang dibuang orang tuanya); 2) anak yang mengalami masalah dalam cara pengasuhan seperti anak yang mengalami tindak kekerasan baik secara fisik, sosial maupun psikologis, anak yang mengalami eksploitasi ekonomi dan seksual serta anak yang diperdagangkan; 3) dan anak yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi seperti anak yang kurang gizi dan anak yang tidak bersekolah atau putus

sekolah. Hal inilah yang terjadi pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak. Keberadaan dan berkembangnya anak-anak kurang beruntung ini merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian khusus bagi Dinas Sosial.

Pemerintah RI melalui Depsos dan jajarannya telah berupaya menangani permasalahan ini dengan regulasi, pengalokasian dana, fasilitas pelayanan hingga penyediaan rumah singgah. Namun kompleksnya permasalahan penyandang kesejahteraan sosial anak ini membuat jumlah anak-anak kurang beruntung ini terus meningkat.

Pemerintah Daerah khususnya Dinas Sosial mendirikan sebuah Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah berdiri sejak tahun 1973. Lembaga ini berperan sebagai suatu lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melayani masyarakat *(public service)* dengan tujuan sebagai pelaksana teknis dalam perlindungan, pengasuhan, pengembangan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial anak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Akan tetapi Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA) belum melakukan upaya pencegahan dan hanya melakukan upaya penanganan terhadap anak-anak penyandang kesejahteraan sosial yang telah berada atau dirujuk ke Balai Rehabilitasi. Penanggulangan permasalahan kesejahteraan sosial anak semakin terasa sulit karena jumlah anak asuh di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA) tidak sebanding dengan jumlah Pekerja Sosial yang ada di Balai.yakni hanya ada 6 orang sedangkan jumlah anak asuh di Balai mencapai 122 anak. Kemudian Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA) hanya terfokus pada anak-anak yang sudah berada di Balai saja sedangkan masih banyak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak (PMKSA) yang masih berada di luar Balai yang belum mendapat perhatian dan penanganan meskipun BRSPA dalam hal pencegahan timbulnya PMKSA sudah melakukan sosialisasi hak-hak anak kepada masyarakat luas dan pemberdayaan melalui keluarga. formal (brspa-dissosdiy.info/, diakses pada tanggal 10 November pukul 22.19)..

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti seberapa efektifnya Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial anak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa

kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, maka makin tinggi tingkat efektivitasnya. (Siagian, 2001:24).

Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak merupakan sebuah organisasi yang mana mempunyai fungsi sebagai perlindungan, pengasuhan, pengembangan dan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial anak. Dan untuk mengukur efektivitas organisasi peneliti menggunakan indikator dari Duncan dalam Steers (1985:53) yaitu 1) Pencapaian tujuan, 2) Integrasi, dan 3) Adaptasi.

Hal ini didukung oleh pernyataan dari Yeremias T. Keban (2008:227), suatu organisasi dikatakan efektif kalau tujuan organisasi atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visinya tercapai. Nilai-nilai ini merupakan nilai-nilai yang telah disepakati bersama antara para stakeholders dari organisasi yang bersangkutan.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA) yang beralamat di Dusun Banjarharjo, Bimomartani, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian dilaksanakan mulai Juni 2018 sampai dengan Desember 2018.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini meliputi : 1) Kepala Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak, 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak, 3) Kepala Seksi Perlindungan di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak, 4) Pekerja Sosial di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak.

Data dan Sumber Data

Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini dan hasil observasi terhadap keadaaan yang ada di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA) Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan data sekunder yang diperoleh berupa profil BRSPA, notulen, standar pengasuhan, arsip, Standar Operasional Prosedur, laporan kegiatan, dan data anak asuh.

Instrumen Penelitian

Instrumen utama di dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai pengumpul data utama dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, alat perekam, kamera, serta dokumen terkait. Peneliti memvalidasi diri sebagai instrumen dengan mengembangkan

wawasan terkait efektivitas Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial anak di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengamatan terbuka dimana subjek mengetahui dan menyadari bahwa hal yang sedang dilakukan diamati oleh peneliti. Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2012:145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Tujuannya adalah untuk mencatat hal-hal, perilaku, perkembangan tentang hal yang berkaitan dengan edektivitas BRSPA dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial anak di DIY.

2. Wawancara

Sugiyono (2012:231), Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan mana dalam suatu topik tertentu.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dimana peneliti sudah menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu namun pertanyaan tersebut dapat berkembang saat wawancara dilapangan.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2006:132). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari BRSPA Yogyakarta, Standar Operasional Prosedur, arsip, notulen, dan data anak asuh.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan dan mengecek hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dan perbandingan antara data hasil pengamatan dan data hasil wawancara.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang meliputi: 1) Pengumpulan data, 2) Reduksi data, 3) Penyajian data, dan 4) Penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2011:246).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berdiri pada tahun 1973 dan beralamat di Banjarharjo, Desa Bimomartani, Kecamatan Ngemplak,

Kabupaten Sleman (Unit 1) dan Ledoksari, Kepek, Wonosari, Gunungkidul (Unit 2) . Lembaga ini berperan sebagai suatu lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melayani masyarakat *(public service)* dengan tujuan sebagai pelaksana teknis dalam perlindungan, pengasuhan, pengembangan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial anak.

Demi mewujudkan proses pengasuhan anak yang maksimal, BRSPA memiliki Visi, Misi, Motto, Sasaran, dan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA). Disamping itu, juga tersedia sarana penunjang pengasuhan guna proses pengasuhan anak asuh bisa berjalan dengan maksimal. Sarana tersebut antara lain: Gedung Konseling, Taman bermain, perpustakaan, kendaraan, dan wisma.

Tahapan pengasuhan di Balai Rehabiltasi Sosial dan Pengasuhan Anak adalah :1) Tahap penerimaan anak asuh, 2) Tahap penempatan dalam pengasuhan, 3) Tahap pelaksanaan pengasuhan, 4) Tahap Reintegrasi, 5) Tahap Monitoring dan Evaluasi, dan 6) Tahap terminasi (pemutusan kontrak).

Efektivitas Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial anak di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam mengukur efektivitas BRSPA, penelitian ini menggunakan Teori Efektivtas menurut Duncan yang dikutip Richard M. Steers (1985:53) dalam bukunya Efektivitas Organisasi yakni : 1) Pencapaian tujuan, 2) Integrasi, 3) Adaptasi.

1) Pencapaian tujuan, pencapaian tujuan dipengaruhi oleh faktor kurun waktu, ketepatan sasaran, dan dasar hukum. Berkaitan dengan hal tersebut Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak memiliki kurun waktu pengasuhan hingga anak asuh berusia 18 tahun atau setelah anak asuh lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), anak asuh di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak memang diwajibkan melanjutkan sekolah ke SMK karena nantinya lulusan dari SMK dinilai lebih siap dan terampil dalam menghadapi dunia kerja. Hal ini didukung oleh Gibson dalam Tangkilisan (2005:65) yang mengatakan bahwa suatu efektivitas dapat diukur dari kejelasan tujuan yang hendak dicapai.

Pengasuhan dibatasi sampai anak asuh berusia 18 tahun karena setelah usia tersebut sudah bukan anak-anak lagi,

namun sudah dikategorikan sebagai remaja. Jika sudah memasuki usia remaja maka anak asuh yang tidak memiliki keluarga akan diasuh oleh Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR). Sedangkan tahap akhir pengasuhan di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA) bisa dimulai saat anak asuh berusia 18 tahun atau lulus SMK, bisa juga saat pihak keluarga memutuskan untuk mengasuh kembali anaknya yang berada di BRSPA, tahap pengasuhan juga bisa berakhir jika ada keluarga yang mengadopsi anak yang berada di BRSPA, namun sebelum itu BRSPA juga melakukan *home visit* yakni kegiatan mengunjungi atau memonitoring keluarga anak asuh, apakah sudah layak mengasuh anaknya kembali dari segi fisik maupun finansial. Bagi keluarga yang ingin mengadopsipun juga harus melalui Dinas Sosial terlebih dahulu dengan memenuhi berbagai persyaratan. Jadi BRSPA benar-benar memperhatikan keluarga yang akan mengasuh anak asuh di BRSPA iu sendiri.

Dalam kurun waktu pencapaian pelaksanaan pengasuhan di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA) sudah efektif, karena tidak mengacu pada lamanya waktu pengasuhan namun lebih mengacu pada kesembuhan dan kesiapan mental para anak asuh untuk menghadapi dunia luar. Penentuan waktu pengasuhan hingga anak asuh berusia 18 tahun atau lulus SMK sebagai pedoman dasar pengasuhan.

Ketepatan sasaran adalah penentuan ketepatan dalam mengambil target yang dijadikan capaian dalam menentukan kriteria-kriteria tertentu sehingga dalam mencapai sasaran yang tepat hendaknya mengunakan spesifik kriteria yang ingin dicapai, realistis sesuai dengan sumber daya. Cunningham (1978:635) menjelaskan bahwa sasaran berguna untuk mengatur sejauh mana suatu perusahaan berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Dalam poin ketepatan sasaran Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak sudah memenuhi sasaran yang telah ditetapkan. Sasaran dari Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA) ada 3 (tiga) sasaran utama dari Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak yaitu Anak Terlantar, Balita Terlantar, dan golongan AMPK (Anak Memerlukan Perlindungan Khusus) yang meliputi Anak yang terpisah dari keluarga, anak berhadapan dengan hukum, kasus eksploitasi, kasus diskriminasi, korban kekerasan dan korban trafficking yang

mana seluruh anak asuh tersebut harus berusia 0 s/d 18 tahun.

Dasar hukum yang digunakan Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak dalam melakukan pengasuhan adalah Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) yang termuat dalam Permensos No.30 Tahun 2011, dengan didukung berbagai dasar hukum lain seperti, UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 34 ayat (!), UU No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang memiliki masalah, Keputusan Presiden No.36 tahun 1990 tentang pengesahan konvensi hak-hak anak, Perda Provinsi DIY No.6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi DIY, Perda Provinsi DIYNo 36 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD dan UPTLTD Provinsi DIY, Perda Provinsi DIY No.44 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Sosial DIY, Perda Provinsi DIY No.3 tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dan juga Permensos No.21 tahun 2014 tentang Pengasuhan Anak.

2) Integrasi, Emitai dalam Indrawijaya (2010:187) menyatakan bahwa Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya.

Integrasi dipengaruhi oleh Prosedur dan Proses Sosialisasi. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Septi Kurniawati (2014) yang menunjukkan bahwa masih kurang jelasnya prosedur yang dipakai oleh LK3 Lestari. Temuan di lapangan menunjukan bahwa Prosedur yang dijalankan di ikuti secara runtun dan saling terkait satu sama lain sehingga memudahkan klien dan para pekerja sosial untuk menerima dan memberikan pengasuhan. Dalam hal Prosedur Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak sudah efektif.

Sedangkan sosialisasi sangat perlu dilakukan agar masyarakat mengenal dan mengetahui apa itu penyandang masalah kesejahteraan sosial anak, apa itu permasalahan sosial, dan tentunya bagaimana cara menangani anak-anak korban permasalahan sosial tersebut. Seperti hasil penelitian dari Rizcah Amelia (2015) yakni menunjukkan bahwa masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Dinas Sosial kota Makassar dalam menangani anak jalanan. Salah satunya masalah sosialisasi kepada masyarakat tentang program penanganan anak jalanan.

Ada 2 (dua) sosialisasi yang dilakukan oleh Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak yaitu sosialisasi formal dan informal. Yang dimaksud dengan sosialisasi formal adalah sosialisasi yang dilakukan bersama Dinas Sosial dan bertempat di lingkungan Dinas, dalam setahun Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak melakukan rutin 6 (enam) kali sosialisasi formal. Kemudian yang dimaksud dengan sosialisasi nonformal adalah sosialisasi di desa-desa atau dalam hal ini langsung terjun ke masyarakat setempat dan sosialisasi ini bersifat insidental, sebelum melakukan sosialisasi tersebut BRSPA melakukan pengamatan kepada masyarakat agar bisa diketahui masyarakat bagian mana yang memang memperlukan sosialisasi terkait pengasuhan anak agar kegiatan sosialisasi bisa lebih tepat sasaran. Dalam hal sosialisasi Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak sudah efektif.

3) Adaptasi, menurut Duncan dalam Steers (1985:53) adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya, Adaptasi terdiri dari beberapa faktor yaitu peningkatan kemampuan dan sarana prasarana. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa Dalam hal peningkatan kemampuan, Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Balai diklat. Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak hanya menfasilitasi pengadaan pelatihan. Materi dan diklat diberikan oleh Badan Kepegawaian Daerah yang bekerja sama dengan Balai diklat sesuai kebutuhan para pegawai di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak. Sedangkan sarana dan prasarana di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak sudah lengkap dan memadai sehingga mampu menunjang proses pengasuhan yang dilakukan. Bangunan-bangunan di BRSPA juga masih kokoh dan bersih, kemudian untuk memulihkan mental para anak asuh di BRSPA juga tersedia layanan konseling yang diisi oleh pegawai yang memang berkompeten dalam hal konseling, proses belajar para anak asuh bisa lebih optimal dikarenakan adanya perpustakaan, juga ada lahan khusus tempat bermain beserta lapangan yang bisa digunakan untuk kegiatan olahraga seperti senam di pagi hari. Fasilitas lain yakni adanya mobil berkapasitas cukup besar yang digunakan untuk mengantar dan menjemput para anak asuh yang pergi ke sekolah. Dengan lengkapnya sarana dan prasarana dapat dikatakan bahwa poin kelengkapan sarana dan prasarana ini sudah efektif di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak.

Faktor Penghambat Efektivitas Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial anak di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam melakukan proses pengasuhan yang dilakukan oleh Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak terdapat beberapa hambatan. Hambatan yang dialami adalah kurangnya jumlah pekerja sosial. Jumlah pekerja sosial yang berada di BRSPA Dusun Banjarharjo, Bimomartani, Ngemplak, Sleman hanya ada 4 (empat) orang, sedangkan Pekerja Sosial yang berada di BRSPA Dusun Kepek, Wonosari, Gunungkidul hanya ada 2 (dua) orang saja, sedangkan jumlah anak asuh di Balai Rehabitasi Sosial dan Pengasuhan Anak itu sendiri mencapai 122 anak tercatat per 31 Agustus 2017. Mengingat ukuran ideal dampingannya adalah 1 (satu) Pekerja Sosial hanya boleh mendampingi 5 (lima) orang anak asuh saja, Tentu dengan melihat angka perbandingan tersebut otomatis akan menurunkan tingkat keefektivitasan proses pengasuhan di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak. Untuk mengatasi hambatan tersebut BRSPA melakukan rekrutmen pramusosial yang bertujuan untuk membantu tugas-tugas para pekerja sosial.

Hambatan yang lain adalah Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak mengaku kesulitan merujuk klien yang tidak sesuai dengan kriteria sasaran dari BRSPA itu sendiri. Dikarenakan BRSPA menerima semua rujukan yang masuk, yang berakibat dengan adanya anak-anak penderita disabilitas yang juga dirujuk ke BRSPA sedangkan pihak BRSPA sendiri tidak melayani pengasuhan penderita disabilitas, selain sasaran dari BRSPA itu sendiri adalah hanya mengasuh anak-anak yang memiliki masalah dalam kepengasuhan namun juga tidak adanya Pekerja Sosial yang berkompeten untuk menangani anak-anak disabilitas, kemudian kurangnya pengetahuan masyarakat akan BRSPA juga ikut andil dalam permasalahan ini. Untuk mengatasi hambatan tersebut Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak menjalin kerjasama dengan lembaga sosial lain yang memang berfokus untuk menangani anak dengan kedisabilitasan, selain itu juga lebih menngencarkan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui sasaran-sasaran dari BRSPA itu sendiri.

Faktor Pendorong Efektivitas Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial anak di Daerah Istimewa Yogyakarta

Selain faktor penghambat, ada juga faktor yang mendorong efektivitas Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial anak di Daerah Istimewa Yogyakarta yakni jejaring kerjasama luas yang berpengaruh dalam hal pengasuhan, selain melakukan kerjasama dengan lembaga sosial swasta, BRSPA juga melakukan kerjasama dengan desa kelurahan, dalam hal kesehatan BRSPA melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit dan Puskesmas, untuk hal pendidikan BRSPA melakuan kerjasama dengan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Kepolisian dan SatpolPP, dan Dukcapil yang nantinya dapat bermanfaat untuk membuatkan KTP atau Akta Kelahiran anak asuh.

Faktor Pendorong lainnya adalah faktor lokasi yang sangat mendukung untuk sebuah Balai Rehabilitasi. Balai Rehabilitasi Sosial Pengasuhan Anak berdiri di tempat yang jauh dari pusat kota dan keramaian yakni beralamat di Dusun Banjarharjo, Bimomartani, Ngemplak, Sleman. Lokasi yang masih asri dan jauh dari pusat keramaian menjadi salah satu faktor pendorong yang berpengaruh dalam hal pengasuhan anak-anak yang memang bermasalah dengan mental mereka. Ditambah dengan adanya layanan konseling yang bisa mempercepat proses pemulihan mental anak asuh di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA) Daerah Istimewa Yogyakarta sudah efektif dalam mencapai tujuan dan sesuai dengan visi misinya.

Pencapaian tujuan dalam pengasuhan di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta dilihat dari kurun waktu yang digunakan dalam pengasuhan, ketepatan sasaran dan dasar hukum yang digunakan dalam memberikan pengasuhan. Dalam hal kurun waktu, waktu yang digunakan dalam pengasuhan adalah sampai anak asuh berusia 18 tahun atau lulus SMK. Sasaran yang ditetapkan juga sudah sesuai dengan klien yang berada di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak. Sedangkan dalam hal dasar hukum juga telah sesuai dengan dasar hukum yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam indikator integrasi terdapat dua hal yang diperhatikan yaitu prosedur dan sosialisasi. Dalam hal prosedur untuk mendapatkan pengasuhan yang ditetapkan dan diterapkan sudah sesuai. Prosedur yang diterapkan runtut, mudah dipahami dan tidak terbelit-belit. Untuk sosialisasi Balai

Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak melakukan 2 (dua) jenis sosialisasi formal dilakukan rutin 6 (enam) kali dalam setahun di Dinas Sosial, sedangkan sosialisasi nonformal dilakukan di desa-desa dengan jangka waktu yang tidak menentu.

Adaptasi dalam indikator efektivitas pengasuhan dilihat dari Peningkatan kemampuan dan sarana dan prasana. Dalam hal peningkatan kemampuan terdapat diklat yang dilakukan oleh Dinas Sosial yang melibatkan Badan Kepegawaian Daerah, Balai Diklat, dan pekerja sosial. Sedangkan dalam hal sarana dan Prasarana Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak Sudah lengkap dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pengasuhan.

Faktor Penghambat dalam Efektivitas Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak dalam Menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya jumlah Pekerja Sosial yakni hanya berjumlah total 6 (enam) orang sedangkan jumlah anak asuh mencapai 122 anak sehingga menyebabkan kurang efektifnya pengasuhan di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak.
b. Sulitnya merujuk klien penyandang disabilitas atau klien yang bukan termasuk sasaran ke lembaga lain dari Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak

Faktor Pendorong Efektivitas Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak dalam Menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

a. Jejaring kerjasama yang luas yakni Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit, Puskesmas, Sekolah (SD, SMP, SMK), Kepolisian, dan Dukcapil sehingga proses pengasuhan dapat berjalan efektif.
b. Lokasi yang strategis yakni jauh dari pusat kota dan keramaian membuat Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak dapat menjalankan proses pengasuhan dengan efektif karena Balai berada di lokasi yang tenang dan sempurna bagi orang-orang yang sedang mengalami masalah mental.

Saran

1. Bagi Pemerintah

a. Pemerintah perlu menambah sosialisasi terkait pengasuhan anak secara merata dan menjangkau seluruh penjuru wilayah yang terindentifikasi atau mempunyai

potensi terdapat permasalahan kesejahteraan sosial anak.

b. Pemerintah perlu menggencarkan penjaringan anak-anak terlantar dalam hal kepengasuhan yang masih belum tertangani

2. Bagi pengelola Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta
   a. Perlunya menambah sosialisasi yang dilakukan oleh pengelola BRSPA
   b. Perlunya menambah jumlah pekerja sosial di BRSPA
3. Bagi Masyarakat
   a. Perlunya partisipasi masyarakat baik berupa fisik maupun non fisik pada pelaksanaan pengasuhan di BRSPA Daerah Istimewa Yogyakarta. .

Daftar Pustaka

Arikunto. Suharsimi .(2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta : PT. Rineka Cipta

Arisman. (2016). Etika Aparatur Dalam Pelayanan Publik

Amelia Rizcah (2015). Efektivtas Pelaksanaan Program Penanganan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar.

Cunningham, J. Barton.(1978).*Suatu Sumber Pendekatan Sumber Daya Dalam Evaluasi dan Keefektivitasan Organisasi*. Human Relations.

Dunn, William N.(2003). *Pengantar AnalisisKebijakanPublik*.Yogyakarta: UGM Press.

Sutrisno, Edy.(2010).Manajemen Sumber DayaManusia.Jakarta:Kencana Prenada Media Grup

.

Keban, Yeremias.T.(2008).*Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik:Konsep, Teori, dan Isu.*Yogyakarta:Gavamedia.

Kurniawati, Septi (2014). Efektivitas Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Lestari Kabupaten Kulonprogo dalam Menangani Konsultasi Perceraian di Kulonprogo

Moleong. L.J.(2012).*Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung : Remaja Rosdakarya

Pasolong,Harbani.(2007).*TeoriAdministrasi Publik*.Bandung: Alfabeta.

Peraturan Gubernur Saerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 100 Tahun 2015 tentang pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Sosial

Permensos RI Nomor. 08 Tahun 2012 Tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

http://brspa-dinsosdiy.info/ (Diakses pada tangal 10 November 2017)

http://yogyakarta.bps.go.id (Diakses pada Tanggal 06 November 2017)